

Daftar Isi

Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan.....	viii
Kata Pengantar	x
Intisari	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan Hasil Penelitian	14
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL	16
2.1 Hubungan Industrial	16
2.1.1 Ideologi Hubungan Industrial	17
2.1.2 Analisis Materialisme dalam Hubungan Industrial	21
2.1.3 Gerakan Sosial dan Agenda Kebijakan dalam Hubungan Industrial.....	22
2.1.4 Pasar Kerja Fleksibel	25
2.2 Pengupahan	28
2.2.1. Upah Menurut Ekonom Liberal Klasik: Adam Smith dan David Ricardo	31
2.2.2 Upah Menurut Karl Marx	35
2.2.3 Upah Ekonom John Maynard Keynes	39
2.2.4 Sejarah Singkat Sistem Pengupahan Modern di Indonesia	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 <i>Setting</i> Penelitian.....	49
3.3 Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5 Kerangka Pikir.....	55

BAB IV KONDISI INDUSTRIAL KABUPATEN BEKASI DAN KOTA YOGYAKARTA	56
4.1 Kabupaten Bekasi dan Kawasan Industri Penopangnya	57
4.1.1 Kawasan Industri MM 2100	61
4.1.2 Kawasan Industri Jababeka.....	63
4.1.3 Lippo Group (Delta Mas dan Delta Silicon II)	64
4.1.4 Kawasan PT East Jakarta Industrial Park (EJIP)	65
4.1.5 Bekasi International Industrial Estate (BIIE).....	66
4.2 Keistimewaan Kota Yogyakarta dan Corak Industrinya	67
4.3 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK): Kabupaten Bekasi dan Kota Yogyakarta.....	70
Ringkasan	75
BAB V MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI: PERAN AKTOR TRIPATRIT PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN.....	77
5.1 Kebijakan Pemerintah	80
5.1.1 Membuat Kebijakan berbasis Kondusifitas Ekonomi	82
5.1.2 Menciptakan Lingkungan Politis yang Stabil	92
5.2 Strategi Pengusaha	98
5.2.1 Manajemen dan Akumulasi Kapital	99
5.2.2 Asosiasi Pengusaha dalam Kerangka Tripatrit	113
5.3 Perbedaan Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Disparitas Upah	116
5.3.1 Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Versi Buruh dan Pemerintah	117
5.3.2 Perbedaan Hasil Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bekasi dan Kota Yogyakarta	126
5.3.3 Pelanggaran Disparitas Upah oleh PP 78/2015.....	129
Ringkasan	131
BAB VI DAMPAK EKONOMI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI KABUPATEN BEKASI DAN KOTA YOGYAKARTA	133
6.1 Hubungan Industrial yang Membentuk Kesulitan Hidup Buruh	136
6.1.1 Upah Tidak Sesuai dengan KHL	142
6.1.2 Rendahnya Daya Beli	144

6.1.3 Kerentanan Sosial dan Ekonomi	153
6.2 Dampak Ekonomi yang dihasilkan Hubungan Industrial Pasca PP 78/2015 ..	158
6.2.1 Ketimpangan Sosial	159
6.2.2 Daya Beli Tidak Maksimal	161
Ringkasan	167
BAB VII KONDISI POLITIK PERBURUHAN PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI KABUPATEN BEKASI DAN KOTA YOGYAKARTA	170
7.1 Berbagai Ideologi Serikat Buruh dalam Menolak PP 78/2015	175
7.1.1 Terbentuknya Dua Perspektif Politik Buruh	175
7.1.2 Serikat Buruh Kuning dan Merah dalam Menolak PP 78/2015	177
7.2 Konflik Industrial dan Upaya Penyelesaian	186
7.2.1 Memangkas Ongkos Produksi	186
7.2.2 Resistensi Buruh dalam Menolak Pelanggaran Hukum Pengusaha	194
7.3 Jalur Perjuangan Menuntut Hak atas Upah Layak	199
7.3.1 Jalur Litigasi dalam Memperjuangkan Upah Layak	208
7.3.2 Politik Prosedural	211
7.3.3 Gerakan Politik Jalanan (<i>Street Level Politics</i>)	219
Ringkasan	225
BAB VIII PENUTUP	227
8.1 Kesimpulan	227
8.2 Rekomendasi	229
Referensi	xi